



PT. TEMPO UTAMA FINANCE

**LAPORAN  
BERKELANJUTAN  
TAHUN 2020**

*“Langkah Awal  
Menuju  
Keuangan  
Berkelanjutan”*

## DAFTAR ISI

<b>1. Strategi Keberlanjutan .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan 2018-2020 .....</b>	<b>5</b>
2.1. Aspek Ekonomi	
2.2. Aspek Sosial	
2.3. Aspek Lingkungan Hidup	
<b>3. Profil Perusahaan .....</b>	<b>7</b>
3.1. Visi Misi Perusahaan	
3.2. Sekilas Perusahaan	
3.3. Skala Organisasi	
3.4. Penjelasan kegiatan usaha dan produk/jasa pembiayaan	
3.5. Keanggotaan dalam Asosiasi	
<b>4. Penjelasan Direksi .....</b>	<b>10</b>
<b>5. Tata Kelola Berkelanjutan .....</b>	<b>14</b>
5.1. Tugas dan tanggung jawab dalam Keuangan Berkelanjutan	
5.2. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan	
5.3. Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan	
5.4. Pendekatan pemangku kepentingan	
5.5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan	
<b>6. Kinerja Berkelanjutan .....</b>	<b>20</b>
6.1. Membangun budaya keberlanjutan	
6.2. Kinerja Ekonomi	
6.3. Kinerja Sosial	
6.4. Kinerja Lingkungan hidup	
<b>7. Referensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....</b>	<b>27</b>

## **1. STRATEGI KEBERLANJUTAN**

### **1.1. Komitmen Berkelanjutan**

PT. Tempo Utama Finance (“Perusahaan”) merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) yang beroperasi di Indonesia dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Sebagai LJK, maka Perusahaan senantiasa menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan menyelaraskan dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola ke dalam proses usaha pembiayaan yang dilakukan. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, kegiatan itu merupakan kontribusi Perusahaan pada penerapan *Sustainable Development Goals* (“SDGs”) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (“TPB”).

Perusahaan mempunyai visi menjadi perusahaan pembiayaan yang profesional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut, Perusahaan mempunyai misi untuk menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan visi misi tersebut maka Perusahaan mempunyai komitmen menerapkan keuangan berkelanjutan secara memadai sesuai kebutuhan dan kapasitas Perusahaan. Komitmen Perusahaan ini selaras dengan Peraturan OJK (“POJK”) No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pelaksanaan komitmen Perusahaan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2020 – 2024 yang menjadi panduan bagi seluruh pihak dalam internal Perusahaan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko khususnya risiko terkait aspek sosial dan lingkungan. RAKB tahun 2020 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Lampiran I POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

### **1.2. Prioritas**

Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 pasal 7, maka Perusahaan telah menyusun prioritas penerapan keuangan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam RAKB tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama: pengembangan kapasitas internal Perusahaan yang dilaksanakan pada periode tahun 2020 – 2021;
2. Prioritas kedua: penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau *Standard Operating Procedure* (“SOP”) yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan dilaksanakan pada periode tahun 2022 – 2023;
3. Prioritas ketiga: pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk implementasi produk/jasa pembiayaan yang selaras keuangan berkelanjutan akan dilaksanakan pada periode tahun 2024.

### **1.3. Tantangan dan Pengelolaan Risiko Keuangan Berkelanjutan**

Dalam pelaksanaan RAKB, Perusahaan menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai SDGs atau TPB dan keuangan berkelanjutan;
2. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman pihak internal Perusahaan mengenai penerapan SDGs dan juga keuangan berkelanjutan;
3. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman Debitur/Calon debitur/pihak eksternal Perusahaan lainnya mengenai penerapan SDGs dan keuangan berkelanjutan;
4. Terbatasnya aplikasi pembiayaan yang berorientasi hijau (*Green Oriented*) dan jika ada, kelayakan kreditnya belum memenuhi standar;
5. Belum adanya perusahaan pembiayaan dan/atau perbankan nasional pada tingkat/level yang sesuai dengan Perusahaan yang dapat menjadi *role model* dalam penerapan keuangan berkelanjutan;
6. Minimnya *Provider*/Penyedia jasa pelatihan penerapan keuangan berkelanjutan yang mempunyai kompetensi yang memadai dan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan Perusahaan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian target keuangan berkelanjutan, maka Perusahaan menerapkan manajemen risiko dalam penerapan RAKB adalah sebagai berikut:

1. Menyusun tata kelola risiko
  - a. Menetapkan penugasan Unit Kerja/Fungsi yang melaksanakan penerapan RAKB;
  - b. Menyusun regulasi, pedoman dan/atau SOP terkait keuangan berkelanjutan;

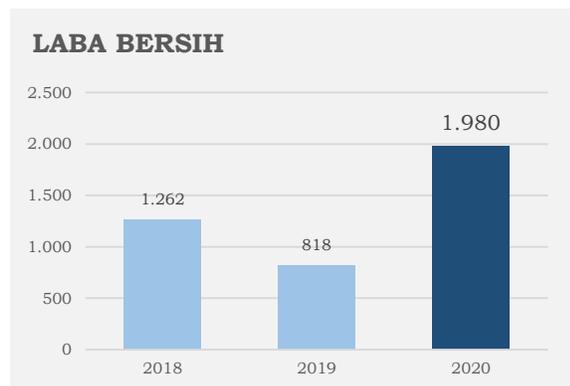
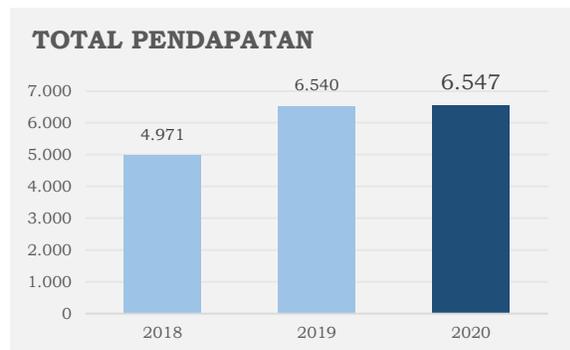
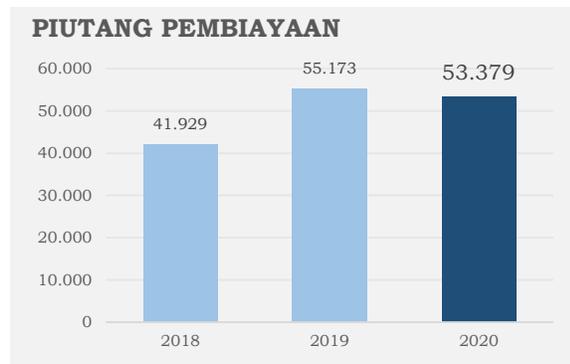
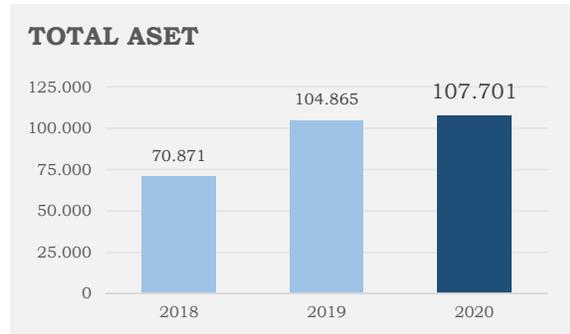
- c. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan RAKB;
  - d. Menerapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* penyaluran piutang pembiayaan pada sektor usaha yang sesuai keuangan berkelanjutan.
2. Menyusun kerangka manajemen risiko
- a. Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, penetapan limit risiko sejalan dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*;
  - b. Rencana Bisnis (“RB”) disusun oleh pejabat Perusahaan dengan yang dikoordinasikan oleh Direksi, telah sejalan dengan sasaran strategis Perusahaan secara keseluruhan dan juga telah disosialisasikan dengan baik pada seluruh tingkatan organisasi.
3. Menyusun proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia melalui:
- a. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen dan pengendalian risiko:
    - i. Terkait risiko pembiayaan:  
menetapkan sektor usaha yang dibiayai, menerapkan segregasi tugas dalam proses pembiayaan dan pemantauan kualitas piutang pembiayaan secara memadai termasuk juga penetapan kolektibilitas dan biaya pencadangan yang memadai;
    - ii. Terkait risiko kepatuhan:  
melakukan sosialisasi internal yang memadai mengenai penerapan RAKB melalui *E-mail*;
    - iii. Terkait risiko reputasi:  
menerapkan proses identifikasi melalui pemantauan kondisi internal/eksternal perusahaan, sedangkan proses pengukuran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menyusun kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung proses manajemen risiko:
    - i. Meningkatkan kompetensi karyawan yang melaksanakan penerapan RAKB;
    - ii. Meningkatkan kompetensi karyawan yang melaksanakan implementasi piutang pembiayaan yang terkait keuangan berkelanjutan.
4. Menyusun sistem pengendalian risiko:
- a. Kecukupan sistem pengendalian internal dalam tahap *1<sup>st</sup>*, *2<sup>nd</sup>* dan *3<sup>rd</sup>* *Line of Defence*;
  - b. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara saling melakukan koordinasi antara fungsi manajemen risiko dan Satuan/Unit Kerja

terkait sehingga diharapkan mendapatkan pengendalian risiko yang memadai;

- c. Pemantauan setiap laporan yang wajib dilaporkan kepada *Regulator*;
- d. Fungsi kepatuhan secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Satuan/Unit Kerja terkait dalam rangka mengawasi pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada *Regulator*.

## 2. IKHTISAR ASPEK BERKELANJUTAN TAHUN 2018 – 2020

### 2.1. Aspek Ekonomi [dalam Rp. Juta]



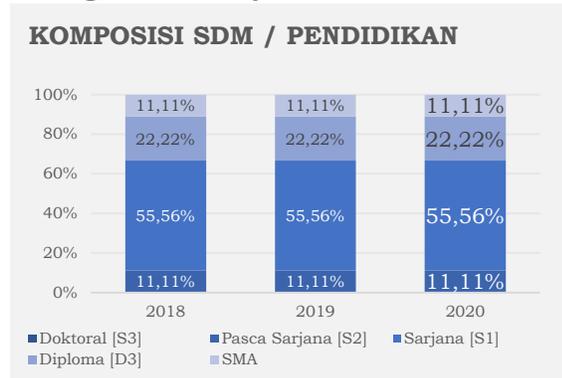
Data produk/jasa pembiayaan ramah lingkungan:

2018	2019	2020
N/A	N/A	<b>N/A</b>

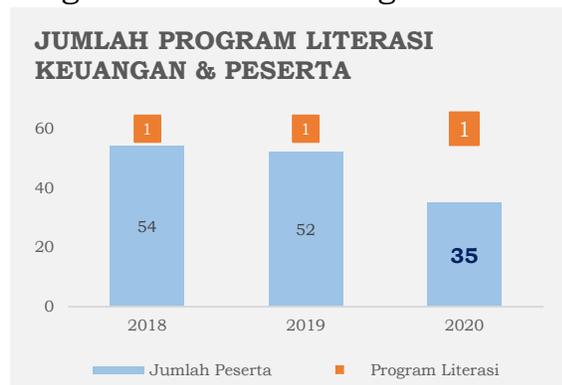
Data pelibatan pihak lokal dalam proses bisnis keuangan berkelanjutan:

2018	2019	2020
N/A	N/A	<b>N/A</b>

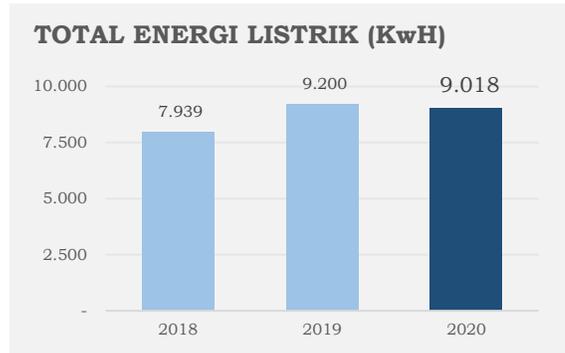
## 2.2. Aspek Sosial Keragaman Karyawan



## Program Literasi Keuangan



## 2.3. Aspek Lingkungan Hidup



Ref: Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Berbasis Energi - Bappenas 2014



### 3. PROFIL PERUSAHAAN

Perusahaan (d/h. PT Artha Rahardja Sakti Leasing) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1983 berdasarkan Akta Nomor 199 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2004.HT.01.01.TH.84 tanggal 30 Maret 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal 12 Juni 1984, Tambahan Nomor 578. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 dihadapan Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto Sarjana Hukum, Notaris bertempat di Jakarta, dilakukan seluruh perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar dimaksud telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-45434.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan akta terakhir lainnya yang termuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Juli 2020 yang telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Juli 2020, Nomor: AHU-AH.01.03-0316653.

#### 3.1. Visi Misi Berkelanjutan

**Visi:**

Menjadi Perusahaan Pembiayaan professional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

**Misi:**

Menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

#### 3.2. Sekilas Perusahaan

Profil Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	PT. Tempo Utama Finance
<b>Alamat Kantor Pusat</b>	Tempo Scan Tower lantai 5 Jln. HR Rasuna Said Kav.2-3 Jakarta 12950
<b>No. Telepon</b>	(021)29667879
<b>E-mail</b>	tufjkt@thetempogroup.com
<b>Website</b>	<a href="http://www.tempoutamafinance.com">http://www.tempoutamafinance.com</a>

### 3.3. Skala Organisasi

<b>Total Aset</b>	Rp. 107.701 juta	
<b>Jumlah Kantor</b>	1 (Satu) Kantor Pusat merangkap kantor operasional di Jakarta. Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang maupun Kantor Selain Kantor Cabang di luar kota Jakarta	
<b>Area Operasional</b>	DKI Jakarta, Jawa Barat & Jawa Timur	
<b>Komposisi karyawan menurut pendidikan</b>	S3	-
	S2	11,11%
	S1	55,56%
	D3	22,22
	SMA	11,11%
<b>Komposisi karyawan menurut jabatan</b>	Komisaris	22,22%
	Direksi	22,22%
	Manager	22,22%
	Supervisor	11,12%
	Non staff	22,22%
<b>Komposisi karyawan menurut usia</b>	60 tahunan	22,22%
	50 tahunan	44,44%
	40 tahunan	33,34%
<b>Komposisi karyawan menurut gender</b>	Pria	33,33%
	Wanita	66,67%
<b>Komposisi karyawan menurut status ketenagakerjaan</b>		100,00%

### 3.4. Kegiatan usaha dan produk/jasa pembiayaan

Perusahaan merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh ijin operasional dan mendapat pengawasan dari OJK. Perusahaan melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menawarkan produk/jasa pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Adapun jenis dan skema pembiayaan meliputi:

<b>Pembiayaan Investasi</b>	<b>Pembiayaan Modal Kerja</b>	<b>Pembiayaan Multiguna</b>
Sewa Pembiayaan	Jual dan Sewa-balik	Sewa Pembiayaan
Jual dan Sewa-balik	Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang	Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran
Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang	Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang	Fasilitas dana

Pembiayaan Investasi	Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan Multiguna
Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang	Fasilitas modal usaha	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK
Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK	
Pembiayaan proyek		
Pembiayaan Infrastruktur		
Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK		

### 3.5. Keanggotaan dalam Asosiasi/Badan

Untuk mendukung kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan, Perusahaan juga bergabung dalam Asosiasi dan Badan sebagai berikut:

Nama Asosiasi/Badan	Keterangan
 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bergabung sejak tahun 1986</li> <li>Posisi sebagai Anggota</li> </ul>
 Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bergabung sejak tahun 2017</li> <li>Posisi sebagai Anggota</li> </ul>

## **4. PENJELASAN DIREKSI**

### **4.1. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Pemerintah merupakan proses pembangunan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Langkah-langkah menuju pembangunan berkelanjutan tercantum pada SDGs/TPB yang terdiri dari 17 (tujuh belas) target tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target terukur. Selain peran pemerintah, SDGs juga mendorong peran berbagai pihak dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan atas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam pembangunan berkelanjutan tersebut adalah LJK yang mempunyai peranan menerapkan keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, LJK diharapkan dapat berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga bersifat inklusif dengan menyediakan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.

Menimbang pentingnya SDGs dan peran LJK dalam mendukung pencapaian target SDGs maka Perusahaan dapat memahami pentingnya mendukung program keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari peran serta Perusahaan dari sektor industri keuangan. Oleh karena itu, Perusahaan telah melakukan persiapan dan langkah-langkah strategis sebagaimana yang diamanatkan OJK melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan lampiran-lampirannya.

Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun RAKB yang realistis dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan Perusahaan. RAKB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Perusahaan jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk mewujudkan rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Jadi, RAKB merupakan arah yang akan dituju dan panduan bagi Perusahaan dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama Perusahaan menerapkan RAKB dalam kegiatan usaha sehingga tema Laporan Keberlanjutan “Langkah awal menuju keuangan berkelanjutan”. Tema ini merupakan tema yang baik bagi Perusahaan untuk menunjukkan tekad dan komitmen dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Langkah kecil merupakan awal suatu langkah besar di masa depan.

Penyusunan RAKB tahun 2020 telah dirintis sejak tahun 2019. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dan Perusahaan menyadari adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman baik dari sisi internal maupun eksternal bahkan dalam masyarakat sendiri sebagai salah satu pemangku kepentingan. Perusahaan melihat bahwa tujuan keuangan berkelanjutan tidak akan tercapai jika tidak didukung sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Selain itu, pada tahap awal, Perusahaan melakukan inventarisasi dan *review* atas Debitur aktif dan portfolio pembiayaan yang sesuai dengan kriteria keuangan berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas internal Perusahaan melalui sosialisasi mengenai keuangan berkelanjutan dan mengikuti *training*/pelatihan/*seminar*/*webinar* bagi karyawan Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan keuangan berkelanjutan.

#### **4.2. Penerapan keuangan berkelanjutan**

Pandemi *Covid-19* telah berlangsung selama tahun 2020 memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan tetap fokus untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian aspek ekonomi tahun 2020 dimana total asset sebesar Rp. 107.701 juta atau meningkat 2,70% dibandingkan pencapaian tahun 2019. Sedangkan pencapaian total piutang pembiayaan sebesar Rp. 53.379 juta atau hanya tumbuh 96,75% dibanding pencapaian tahun 2019. Total pendapatan Perusahaan dibandingkan pencapaian tahun 2019 relatif masih stabil yaitu sebesar Rp. 6.547 juta atau hanya tumbuh sebesar 100,12%. Namun demikian, Perusahaan mampu membukukan laba bersih tahun 2020 mencapai Rp. 1.980 juta atau meningkat 141,97% dibandingkan pencapaian tahun 2019. Peningkatan laba bersih ini didukung oleh kualitas piutang pembiayaan yang sehat sehingga dapat memberikan pendapatan optimal. Sampai akhir tahun 2020, jumlah piutang pembiayaan yang masuk kriteria keuangan berkelanjutan masih belum tersedia dalam piutang pembiayaan Perusahaan. Demikian juga, masih belum ditemukan pelibatan pihak lokal dalam dalam proses bisnis keuangan berkelanjutan yang dilakukan Perusahaan.

Pencapaian aspek sosial tahun 2020 juga menunjukkan kondisi yang stabil dengan jumlah komposisi sumber daya manusia berdasarkan pendidikan tidak

mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Sedangkan jumlah pelatihan/*training*/seminar/*webinar* yang dilakukan mencapai 8 (delapan) sesi atau mengalami sedikit penurunan sebesar 11,11% dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi *Covid-19* berlangsung. Walaupun jumlah pelatihan/*training*/seminar/*webinar* mengalami sedikit penurunan tapi jumlah karyawan yang mengikuti sesi pelatihan/*training*/seminar/*webinar* selama tahun 2020 mengalami kenaikan. *Training* mengenai keuangan berkelanjutan juga telah dilaksanakan secara *online* dan diselenggarakan oleh Institusi pelatihan yang berkompeten.

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk turut serta dalam memberikan literasi keuangan yang baik kepada masyarakat, maka Perusahaan terus melakukan Program Literasi Keuangan dengan melibatkan masyarakat. Tahun 2020, Perusahaan mengusung tema Menjadi Konsumen yang Cerdas dalam Mengelola Keuangan dengan Dana Pembiayaan dan juga melibatkan praktisi yang menyampaikan mengenai potensi budidaya tanaman Hidroponik yang dapat menjadi hobi yang produktif bagi masyarakat dalam masa pandemi.

Sebagai perusahaan pembiayaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak langsung terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, Perusahaan telah mengidentifikasi ketentuan mengenai lingkungan hidup yang dimiliki Debitur/Calon debitur korporasi dalam permohonan pengajuan pembiayaan. Sedangkan dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan juga mengidentifikasi aspek lingkungan berupa penggunaan energi listrik dan pemakaian kertas yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”). Berdasarkan referensi dari Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Bappenas”) tahun 2014, maka selama tahun 2020 Perusahaan mampu melakukan penghematan emisi GRK yang dihasilkan sebesar 2,00% dibandingkan tahun 2019 atau hanya menghasilkan emisi GRK dari kegiatan usahanya sebesar 6.538 kgCO<sub>2</sub>. Walaupun jumlah emisi GRK yang dihasilkan masih dalam jumlah yang kecil, namun Perusahaan tetap berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi pada target pemerintah untuk menurunkan emisi GRK yang juga merupakan salah target SDGs melalui inisiatif penghematan energi dan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif.

#### **4.3. Strategi pencapaian target**

Pandemi *Covid-19* masih berlangsung dan berlanjut sampai tahun 2021. Namun demikian, program vaksinasi dalam skala besar dan beragam insentif yang dilakukan Pemerintah dapat menjadi pendorong proses pemulihan ekonomi nasional. Perusahaan memandang kondisi ini merupakan peluang usaha yang

baik bagi industri jasa keuangan. Namun demikian, situasi pandemi telah memberikan banyak pelajaran dan juga merubah pola bisnis termasuk juga usaha pembiayaan kearah *trend* digitalisasi yang mempunyai implikasi besar terhadap efektivitas dan efesiensi proses bisnis. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan usaha yang telah disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi Perusahaan dengan tetap menjaga kualitas piutang pembiayaan yang sehat. Oleh karena itu, Perusahaan akan tetap fokus pada pembiayaan produktif pada target pasar yang telah dilayani dengan baik.

Sedangkan dalam pelaksanaan tata kelola, Perusahaan memberikan penugasan kepada Satuan/Unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan rencana penerapan keuangan berkelanjutan. Pelaksana keuangan berkelanjutan tersebut berada dibawah pengawasan langsung Direksi dan bertugas untuk memastikan penerapan keuangan berkelanjutan telah dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan termasuk juga penerapan manajemen risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan tersebut.

Perusahaan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung aktivitas operasional. Sedangkan dalam hal penggunaan energi, Perusahaan juga terus melanjutkan komitmen untuk memberikan kontribusi dalam penurunan emisi GRK dari kegiatan usahanya dengan meningkatkan kesadaran (*awareness*) internal Perusahaan melalui inisiasi penghematan energi dan efesiensi proses bisnis.

Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mengenai keuangan berkelanjutan, Perusahaan tetap melanjutkan komitmen untuk memberikan pelatihan/ *training* yang tepat dan sesuai kebutuhan dari Lembaga/Institusi yang mempunyai kompetensi bagi karyawan-karyawan yang bertanggung jawab atas penerapan keuangan berkelanjutan.

## **5. TATA KELOLA BERKELANJUTAN**

### **5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – “GCG”) dilakukan Perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mempunyai struktur tata kelola yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Satuan/Unit Kerja dan Komite yang dibentuk. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur internal, sistem informasi manajemen dan fungsi/tugas pokok masing-masing Satuan/Unit Kerja dalam struktur Perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola yang menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang dilaksanakan Direksi diselenggarakan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Direksi adalah organ tata kelola dengan fungsi representasi dan manajerial yang memegang peran utama dalam kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan strategi dan inisiatif Perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang agar dapat dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi didukung oleh beberapa Satuan/Unit Kerja dan Komite yang dibentuk.

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, telah disusun RAKB 2020-2024 yang menjadi panduan Perusahaan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Sedangkan pada pelaksanaannya, Perusahaan juga menyusun tata kelola berkelanjutan dimana Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab atas penerapan keuangan termasuk melakukan fungsi supervisi atau pengawasan atas pelaksanaannya.

Direksi juga menugaskan Satuan Kerja Pemasaran sebagai pelaksana penerapan keuangan berkelanjutan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun RAKB;
- b. bertanggung jawab kepada Direksi atas penerapan RAKB;

- c. mengelola program penerapan RAKB;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan/Unit Kerja lainnya terkait pelaksanaan RAKB dan penyusunan Laporan Berkelanjutan.

Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam tata kelola berkelanjutan yaitu melakukan koordinasi dengan Satuan/Unit Kerja lainnya terkait penyusunan infrastruktur tata kelola seperti regulasi internal, pedoman dan SOP termasuk juga koordinasi dalam penyusunan Laporan Berkelanjutan. Selain itu, fungsi Kepatuhan juga melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap program keuangan berkelanjutan.

Sedangkan Satuan/Unit Kerja lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan keuangan berkelanjutan melalui koordinasi dengan pelaksana keuangan berkelanjutan sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

## 5.2. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan

Dalam menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan penerapan RAKB, maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Selama tahun 2020, terdapat 14 (empat belas) karyawan Perusahaan yang mengikuti Pelatihan/*Training*/*Seminar*/*Webinar* dengan berbagai topik yang mendukung kegiatan usaha dan penerapan keuangan berkelanjutan dengan perincian sebagai berikut:

Topik	Jumlah Peserta (karyawan)
Kebijakan dan Strategi Industri Pembiayaan	3
Tingkat Kesehatan Perusahaan	5
Sertifikasi Pembiayaan	2
<i>Sustainable Finance</i>	2
Manajemen Risiko	1
<i>Factoring</i>	1

Adapun mengenai pelatihan keuangan berkelanjutan yang telah dilakukan perusahaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Topik	Penyelenggara
<i>One Day Online Training with Zoom Application: "Implementasi Sustainable Finance sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017"</i>	<i>Infobank Institute</i>

### 5.3. Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan

Perusahaan memahami dan menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif, khususnya dalam penerapan keuangan berkelanjutan yang menyelaraskan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Perusahaan tetap mengacu pada POJK No. 44/POJK. 05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang dengan menerapkan 4 (Empat) pilar manajemen risiko yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
4. Sistem pengendalian internal.

Dalam penerapannya, Perusahaan melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam hal tata kelola, Perusahaan menyusun struktur tata kelola melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dan penugasan Satuan Kerja Pemasaran untuk melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan. Selanjutnya, Perusahaan melakukan evaluasi terhadap regulasi internal untuk disesuaikan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Sedangkan dalam kegiatan penyaluran piutang pembiayaan, Perusahaan telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang memadai dimana target sektor usaha akan dibiayai sudah dilayani dan dipahami dengan baik. Selain itu, dalam proses bisnis juga telah disusun segregasi/pembagian tugas yang memadai mulai dari proses inisiasi pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pemantauan kualitas piutang pembiayaan.

Dalam sistem pengendalian internal, penerapan *1<sup>st</sup> Line of Defense* pada masing-masing Satuan/Unit Kerja dan didukung dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai *2<sup>nd</sup> Line of Defense* yang menjadi mitra kerja Satuan/Unit Kerja terkait dalam melakukan pemantauan risiko. Selanjutnya, Audit Internal sebagai *3<sup>rd</sup> Line of Defense* untuk memastikan seluruh regulasi internal telah diterapkan secara baik dan benar oleh seluruh pihak dalam internal Perusahaan.

Mengenai pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*, Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya pada Bab XII mengenai pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*. Sejalan dengan POJK tersebut, maka Perusahaan membentuk Unit Kerja Anti *Fraud* ("UKAF") sebagai salah satu upaya preventif aktif untuk mengendalikan /mengurangi potensi kejadian *fraud*.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan khususnya terkait pengendalian /pemantauan *fraud* maka juga telah disusun Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Pengendalian *Fraud* (“P2SAF”) yang menjadi petunjuk pelaksanaan & tindakan dalam pengendalian *fraud* melalui serangkaian proses kegiatan yang dikenal sebagai Catur Pilar Strategi Anti *Fraud* (“CPSAF”) yang mencakup kegiatan:

1. pencegahan;
2. pendeteksian;
3. investigasi /pelaporan & sanksi;
4. pemantauan /evaluasi & tindak lanjut.

Berdasarkan data UKAF, sampai akhir tahun 2020 tidak terdapat kasus *fraud* yang terjadi dalam Perusahaan.

Dalam hal penanganan pengaduan Debitur, Perusahaan telah membentuk Satuan Kerja yang menangani pengaduan Debitur dalam bentuk Satuan Kerja Layanan Pengaduan Debitur (“LPD”) dan mengacu pada POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Satuan Kerja LPD bertujuan untuk melakukan penyelesaian pengaduan yang disampaikan Debitur dan sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak Debitur. Sebagai pedoman pelaksanaan LPD, Perusahaan telah menyusun mekanisme penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan Debitur.

Sampai akhir tahun 2020, berdasarkan data Satuan Kerja LPD, Perusahaan belum menerima pengaduan Debitur dan tidak ada pengaduan Debitur yang belum terselesaikan.

#### 5.4. Pendekatan pemangku kepentingan

Perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi termasuk juga menyiapkan rencana Perusahaan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Perusahaan juga melakukan pemetaan dan identifikasi pelibatan pemangku kepentingan antara lain:

Pemangku Kepentingan	Topik	Metode Pelibatan	Frekwensi Pendekatan	Respon Perusahaan
Debitur	Sosialisasi produk/jasa pembiayaan yang jelas dan transparan	Kantor Pusat, Telepon & E-mail Perusahaan dan Website	Setiap saat	Menyampaikan informasi produk/jasa pembiayaan
	Penjelasan mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh	Welcoming Letter dan Perjanjian Pembiayaan	Saat persetujuan fasilitas pembiayaan	Menyampaikan informasi detail mengenai fasilitas produk/jasa pembiayaan

## Laporan Berkelanjutan 2020

Pemangku Kepentingan	Topik	Metode Pelibatan	Frekwensi Pendekatan	Respon Perusahaan
	Kemudahan akses	Telepon & <i>E-mail</i> yang bisa dihubungi dan informasi Kontak pada <i>Website</i>	Setiap saat	Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi dari Debitur
	Layanan Pengaduan Debitur ("LPD")	Telepon & <i>E-mail</i> PIC LPD	Setiap saat	Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi pengaduan dari Debitur
<b>Pemegang Saham</b>	Penyampaian informasi dan kinerja keuangan dan/atau non keuangan akhir tahun	Pelaporan Kinerja dan RUPS	Kuartal dan tahunan	Melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan
	Kegiatan/aktivitas penting lainnya	Pelaporan kegiatan/aktivitas penting	Setiap ada kegiatan/aktivitas penting	Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan/aktivitas penting
<b>Regulator</b>	Kepatuhan peraturan dan perundang-undangan	Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan ("RBT") dan Laporan Realisasinya	RBT 1 tahun sekali & Laporan realisasi 2 kali setahun	Menyusun RBT dan laporan-laporan yang diwajibkan Regulator sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
		Menyusun RAKB dan Laporan Berkelanjutan	1 tahun sekali	
		Penyampaian laporan lainnya yang diwajibkan Regulator sesuai jadwal yang telah ditentukan	Sesuai jadwal yang ditetapkan Regulator	
<b>Pemasok/Mitra Kerja</b>	Hubungan bisnis yang saling menguntungkan	Sosialisasi kebijakan mengenai hubungan dengan pemasok	Minimal 1 tahun sekali	Kerjasama dengan pemasok/mitra kerja dalam penyediaan barang/jasa bagi Perusahaan
	Proses pengadaan barang/jasa yang adil dan transparan			
<b>Karyawan</b>	Pemenuhan hak karyawan	Media Internal seperti <i>E-mail</i> , <i>Internal Memo</i> , <i>Internal Meeting</i> dan Evaluasi Tahunan	Setiap ada informasi yang disampaikan kepada karyawan dan 1 tahun sekali untuk Evaluasi Tahunan	Sosialisasi kebijakan kepada karyawan
	Kesempatan pengembangan diri dan karir			
	Proses rekrutmen			
	Pengalaman bekerja yang berharga			
<b>Komunitas dan/atau Masyarakat</b>	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Pertemuan dengan komunitas dan/atau masyarakat	Minimal 1 tahun sekali	Memberikan literasi dan pengetahuan mengenai keuangan, produk/jasa Perusahaan dan berbagai info yang menarik dan produktif bagi masyarakat

## **5.5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan**

Tahun 2020 merupakan tahun awal bagi Perusahaan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Sejauh ini, Perusahaan belum menemukan tantangan yang berpengaruh signifikan ke dalam proses bisnis. Namun demikian, Perusahaan telah melakukan identifikasi danantisipasi beberapa tantangan sebagai berikut:

### **1. Pemahaman, pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) karyawan Perusahaan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan.**

Fokus utama Perusahaan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan pada tahun 2020 adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) terhadap pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh karyawan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan secara aktif mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan terkait keuangan berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan aktivitas internal yang mendorong penghematan penggunaan energi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan operasional, khususnya penggunaan energi listrik dan pemakaian kertas.

### **2. Adanya *role model* penerapan keuangan berkelanjutan pada tingkat/level yang sesuai dengan Perusahaan.**

Sebagai LJK yang baru pertama kali mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, Perusahaan berusaha mencari bentuk dan model penerapan yang sesuai dengan kapasitasnya. Mengingat pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan tersebut, maka Perusahaan menyusun rencana penerapan yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha yang dilakukan. Selanjutnya, proses belajar perlu dilakukan secara terus menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan keuangan berkelanjutan.

### **3. Mendapatkan dukungan masyarakat, Pemerintah dan juga dari Debitur/Calon debitur.**

Penerapan keuangan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari berbagai pihak seperti masyarakat, Pemerintah melalui regulasinya dan Debitur/Calon debitur yang juga perlu untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Perusahaan akan terus mematuhi peraturan perundang-undangan sekaligus mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Debitur/Calon debitur untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan.

## **6. KINERJA BERKELANJUTAN**

### **6.1. Membangun budaya berkelanjutan**

Menjawab tantangan penerapan keuangan berkelanjutan, salah satu yang harus terus dikembangkan oleh Perusahaan adalah membangun budaya berkelanjutan pada seluruh karyawan Perusahaan dan masyarakat/komunitas yang merupakan pihak eksternal Perusahaan. Sosialisasi budaya keberlanjutan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kepedulian terhadap pentingnya keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Komitmen dalam membangun budaya berkelanjutan dimulai dari internal Perusahaan. Salah satunya adalah melakukan inisiasi program dan aktivitas penghematan penggunaan energi listrik dan pemakaian kertas dalam kegiatan operasional. Program ini merupakan langkah awal dan melibatkan seluruh karyawan Perusahaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Program ini mendapatkan respon yang baik dimana sampai akhir tahun 2020, Perusahaan mampu mengurangi penggunaan energi listrik 2,00% dibandingkan tahun 2019 atau sebesar 9.017,85 kWh. Sedangkan penggunaan kertas sampai akhir tahun 2020 juga mengalami penurunan 6,66% dibandingkan tahun 2019 atau mencapai sebanyak 53.200 lembar kertas.

Penurunan penggunaan energi listrik ini berkontribusi pada penurunan emisi GRK yang dihasilkan Perusahaan melalui aktivitas usahanya. Menurut referensi perhitungan yang mengacu pada Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan oleh Bappenas pada tahun 2014, maka emisi GRK yang dihasilkan Perusahaan sampai akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar 6.537,94 kgCO<sub>2</sub> atau mengalami penurunan 2,00% dibanding tahun 2019. Walaupun masih dalam jumlah yang kecil, namun Perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung target Pemerintah dalam penurunan emisi GRK dengan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya melakukan penghematan penggunaan energi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

### **6.2. Kinerja Ekonomi**

Tahun 2020 diwarnai dengan tantangan yang sangat besar yaitu pandemi *Covid-19* yang dampaknya tidak hanya kepada Perusahaan tapi juga kepada seluruh dunia sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat pandemi, Badan Pusat Statistik (“BPS”) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,07% secara *year on year* (“yoy”) akibat pelemahan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi yang berdampak pada

industri pembiayaan. OJK menyatakan piutang pembiayaan industri pembiayaan pada tahun 2020 mengalami kontraksi 17,10% (yoy) dibandingkan pertumbuhan 3,70% (yoy) yang dicapai pada tahun 2019.

Menyikapi situasi tersebut, Perusahaan berupaya mempertahankan kondisi keuangan tetap sehat dan kegiatan usaha yang bertumbuh secara *prudent* dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kegiatan operasional. Hal ini penting dan juga merupakan kontribusi Perusahaan dalam mendukung kepada program Pemerintah untuk menangani pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional.

Perusahaan menyadari bahwa sektor usaha mengalami situasi yang sulit dan banyak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang berlangsung ini. Namun demikian, Perusahaan juga menyadari bahwa beberapa sektor usaha masih dapat tumbuh secara baik dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan strategi usaha untuk tumbuh secara bertanggung jawab, selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian pada sektor usaha dimana Perusahaan mempunyai pengetahuan, kapabilitas dan kompetensi yang memadai. Perusahaan masih fokus pada pembiayaan sektor produktif melalui pembiayaan investasi dan modal kerja.

Dengan menerapkan strategi tersebut, per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan total asset sebesar Rp. 107.701 juta atau meningkat 2,70% dibandingkan pencapaian tahun 2019. Di dalam total asset tersebut, piutang pembiayaan tahun 2020 mencapai jumlah sebesar Rp. 53.379 juta atau mengalami penurunan sebesar 3,25% dibandingkan tahun 2019.

Dengan pertumbuhan usaha ini, Perusahaan mampu mencatat total pendapatan sebesar Rp. 6.547 juta atau mengalami sedikit meningkat sebesar 0,11% dibandingkan pencapaian tahun 2019. Akhirnya, laba bersih setelah pajak Perusahaan pada akhir tahun 2020 mencapai Rp. 1.980 juta atau naik sebesar 141,97% dibanding pencapaian tahun 2019.

Perbandingan pencapaian beberapa indikator keuangan dan rasio-rasio penting adalah sebagai berikut:

[Rp. Juta]	2018	2019	2020
Total Aset	70.871	104.865	107.701
Piutang Pembiayaan	41.929	55.173	53.379
Total Pendapatan	4.971	6.540	6.547
Laba bersih	1.262	818	1.980
Rasio-2 penting [dalam %] :			
ROA ( <i>Return on Asset</i> )	1,74%	0,69%	1,90%
ROE ( <i>Return on Equity</i> )	1,81%	0,95%	1,89%
NPF (Netto)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Permodalan	331,26%	387,88%	372,37%
<i>Current Ratio</i>	46.000,54%	43.590,21%	16.623,53%

Dalam piutang pembiayaan yang sedang berjalan dan aktif sampai akhir tahun 2020, belum terdapat Debitur dan portofolio piutang pembiayaan yang sesuai dengan kategori kegiatan usaha berkelanjutan.

### 6.3. Kinerja Sosial

Perusahaan berkomitmen untuk dapat terus memberikan layanan atas produk dan/atau jasa pembiayaan yang setara kepada seluruh Debitur dan masyarakat. Layanan yang setara tersebut diwujudkan dengan memberikan informasi produk, fitur atau program kepada nasabah melalui *Website*, *E-mail*, brosur, atau media lainnya.

#### 6.3.1. Ketenagakerjaan

Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan pemangku kepentingan yang berjalan beriringan dengan pertumbuhan kegiatan usaha. Oleh karena itu, dalam membangun hubungan kerja dengan karyawan, Perusahaan mengacu dan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait ketenagakerjaan, maupun kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu bentuk kepatuhan ini dilakukan Perusahaan adalah dengan tidak merekrut pekerja anak. Selain itu Perusahaan juga tidak memberlakukan kerja paksa karena jam kerja karyawan telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesempatan bekerja, Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada siapapun yang memiliki kompetensi yang sesuai, dan integritas tinggi yang menjunjung etos kerja dan kejujuran.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja terbaik dari karyawan, maka Perusahaan berupaya menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang layak, aman, sehat dan kondusif dengan mematuhi protokol kesehatan dan tersedianya fasilitas yang menunjang kebutuhan karyawan.

Untuk memastikan hak-hak karyawan telah terpenuhi dengan baik, maka Perusahaan telah memberikan remunerasi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dan juga berdasarkan kinerja dan pencapaian karyawan. Seluruh karyawan telah menerima remunerasi yang sesuai dengan ketentuan upah minimum regional.

Perusahaan terus berkomitmen dan mendukung seluruh karyawan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mencapai prestasi dan kinerja terbaik melalui pelatihan/*training*/seminar/*webinar* yang dilaksanakan oleh *Regulator* maupun lembaga-lembaga pendidikan terkemuka yang mempunyai kompetensi baik. Karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kapasitas dan kompetensinya dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan.

### **6.3.2. Masyarakat**

Sampai akhir tahun 2020, Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) kantor pusat yang merangkap kantor operasional di Jakarta dengan cakupan area operasional berada di area Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kegiatan usaha dan pelayanan Debitur/Calon Debitur masih dapat dilakukan melalui jaringan kantor yang tersedia dan Perusahaan belum memiliki rencana untuk membuka Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”).

Mengenai pemberdayaan masyarakat, Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan program Literasi dan Inklusi Keuangan. Dalam program ini, Perusahaan berkesempatan untuk melakukan tatap muka dan melakukan komunikasi yang baik untuk menyampaikan berbagai hal mengenai literasi keuangan yang bermanfaat kepada berbagai komunitas masyarakat. Tahun 2020, Perusahaan tetap menjalankan program literasi keuangan melalui Zoom Meeting dengan tema “Menjadi Konsumen yang Cerdas dalam Mengelola Keuangan dengan Dana Pembiayaan”. Selain itu, Perusahaan juga menyajikan paparan menarik dari praktisi mengenai potensi budidaya hidroponik yang dapat menjadi hobi produktif bagi masyarakat dalam masa pandemi. Program literasi keuangan ini diikuti sebanyak 35 orang peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Perusahaan belum memiliki mekanisme pengaduan khusus disediakan untuk menampung pengaduan dari masyarakat terkait aspek sosial dan lingkungan. Namun demikian, masyarakat tetap dapat melakukan pengaduan melalui saluran pengaduan sebagai berikut:

Telepon	021)29667879
E-mail	tufjkt@thetempogroup.com

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Debitur/Calon debitur, maka Perusahaan membuka diri untuk menerima saran ataupun pengaduan dari Debitur/Calon debitur. Perusahaan telah mempunyai pedoman dan mekanisme terkait layanan pengaduan Debitur yang tercantum dalam SOP Layanan Pengaduan Debitur. Sampai akhir tahun 2020, belum ada laporan pengaduan Debitur yang diterima dan juga tidak ada pengaduan Debitur yang belum diselesaikan.

#### **6.4. Kinerja Lingkungan Hidup**

Sebagai perusahaan pembiayaan, aktivitas usaha yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang dapat secara langsung membahayakan ataupun berpotensi merusak lingkungan hidup. Namun demikian, Perusahaan berkomitmen turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Partisipasi Perusahaan diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup dalam mengurangi dampak pemanasan global.

Untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup tersebut, Perusahaan senantiasa melakukan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada karyawan mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup sebagai wujud komitmen dan kontribusi Perusahaan. Adapun program pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Perusahaan adalah sebagai berikut:

##### **1. Penghematan Penggunaan Energi Listrik**

Penggunaan energi yang paling besar digunakan adalah listrik karena kegiatan operasional Perusahaan sangat mengandalkan penggunaan perangkat elektronik untuk mendukung pelayanan bagi Debitur/Calon debitur.

Inisiasi program penghematan penggunaan energi listrik dilakukan di kantor pusat Perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran (*awareness*) bagi karyawan terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pada tahap awal, Perusahaan melakukan himbauan untuk mematikan peralatan kantor seperti lampu dan komputer/laptop jika tidak digunakan. Penghematan penggunaan energi listrik ini juga diimplementasikan dengan menggunakan lampu *Light Emitting Diode* ("LED") yang hemat energi dan mematikan lampu penerang ruangan selama jam istirahat di siang hari.

Dengan beragam inisiatif tersebut, berikut ini trend konsumsi penggunaan energi listrik per tahun:

	2018	2019	2020
Konsumsi energi (kWh)	7.939	9.200	9.018

## 2. Penghematan Pemakaian Kertas

Kertas merupakan perlengkapan kerja yang banyak digunakan dalam aktivitas operasional Perusahaan. Kertas terbuat dari kayu-kayuan yang diproses menjadi *pulp*, maka penghematan pemakaian kertas akan berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, Perusahaan telah melakukan aktivitas dan memberikan himbauan kepada karyawan untuk melakukan penghematan pemakaian kertas.

Aktivitas dan himbauan tersebut dilakukan dengan terus mendorong penggunaan dan pemanfaatan kertas bekas layak pakai di lingkungan kerja. Selain itu, penghematan pemakaian kertas juga dilakukan dengan pemanfaatan sistem *online* antara lain pengajuan absensi, cuti dan administrasi kepegawaian melalui aplikasi *Human Resource Information System* (“HRIS”). Perusahaan juga mulai mengembangkan Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan (“FAPP”) secara digital sehingga dapat mengurangi pemakaian kertas dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan.

Dalam hal penggunaan peralatan kerja, mesin *photocopy* dan *printer* (*Multifunction Printer* – “MFP”) yang digunakan telah dilengkapi dengan *Personal Identification Number* (“PIN”) & *Job Storage* sehingga pencetakan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lebih terkontrol. Mesin MFP ini juga dapat digunakan untuk mencetak dokumen dua sisi (bolak-balik), sehingga bisa meminimalisir pemakaian kertas.

Berikut ini jumlah pemakaian kertas per tahun (lembar) yang digunakan Perusahaan:

	2018	2019	2020
Jumlah kertas yang digunakan (lembar)	19.260	56.995	53.200

Sehubungan dengan komitmen Perusahaan untuk memberikan kontribusi pada penurunan emisi GRK, maka Perusahaan melakukan perhitungan estimasi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dengan menggunakan referensi Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan Bappenas tahun 2014. Berdasarkan data penggunaan energi listrik yang digunakan dalam kegiatan usaha, maka Perusahaan menghitung emisi GRK yang dihasilkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	2018	2019	2020
Emisi GRK yang dihasilkan (kgCO <sub>2</sub> )	5.756	6.670	6.538

## 7. REFERENSI PERATURAN OJK

[POJK No. 51/POJK.03/2017]

No	Pengungkapan	Halaman
1	Penjelasan Strategi berkelanjutan	1
2	Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan	5
	a. Aspek Ekonomi	5
	b. Aspek Sosial	6
	c. Aspek Lingkungan hidup	6
3	Profil singkat Perusahaan	7
	a. Visi Misi keberlanjutan	7
	b. Nama, Alamat, Nomer telepon, Alamat surat elektronik ( <i>E-mail</i> ) dan <i>Website</i> Perusahaan	7
	c. Skala usaha Perusahaan	8
	d. Penjelasan singkat produk/jasa pembiayaan	8
	e. Keanggotaan dalam Badan/Asosiasi	9
4	Penjelasan Direksi	10
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan	10
	b. Penerapan keuangan berkelanjutan	11
	c. Strategi pencapaian target	12
5	Tata kelola berkelanjutan	14
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	14
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	15
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala dan meninjau efektifitas proses manajemen risiko Perusahaan	16
	d. Penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan	17
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	19
6	Kinerja berkelanjutan	20
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya berkelanjutan di internal Perusahaan	20
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi 3 (tiga) tahun terakhir	20
	c. Kinerja sosial 3 (tiga) tahun terakhir	22
	d. Kinerja lingkungan hidup bagi Perusahaan	24

Lembar ini sengaja dikosongkan

Lembar ini sengaja dikosongkan

Lembar ini sengaja dikosongkan